



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA



Rencana Kerja



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala kemampuan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga rencana kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma Tahun 2025 ini dapat terselesaikan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2025 merupakan Tahun Kedua Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2021- 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah, Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah serta Bab V Penutup.

Dengan telah dikeluarkannya dokumen Renja ini, maka diharapkan kepada semua pihak utamanya aparatur Dinas Lingkungan Hidup agar dalam menyusun program dan kegiatannya hendaknya senantiasa mengacu kepada Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 agar kinerjanya dapat diukur dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan saran serta masukan yang positif sehingga Renja ini dapat tersaji dihadapan para pihak yang berkepentingan. Demikian, kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
3.3. Program dan Kegiatan	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	50
BAB V PENUTUP	51
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Sedangkan sistematika penyusunan RENJA mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Seluma.

Selanjutnya Renja Dinas Lingkungan Hidup tersebut akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 untuk mendukung visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Seluma serta menjadi estimasi dasar dalam penganggaran, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma dalam penyusunan Renja 2025 yaitu antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
9. Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
11. Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan.
15. Peraturam Menteri dalam negeri nomor 86 Tahu 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
18. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
19. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.
22. Peraturan Bupati Seluma Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma.

1.3. Maksud dan Tujuan

- Renja ini merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- Renja ini memberikan gambaran umum pembangunan pada Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Seluma, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.
- Mensinkronkan dan Mensinergikan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah dan turut mensukseskan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.
- Panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma Tahun 2025 dan untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma Tahun 2025, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja DLH

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai pada Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu (2024) dapat terlihat dari laporan evaluasi Renja periode tahun 2024 dimana pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan sasaran strategis terdapat uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 memiliki Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target Nilai **67,42 (B)** dari target tersebut nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup mencapai nilai **69,90 (B)** dan mencapai target. Hal tersebut diperoleh dari akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma. Adapun komponen yang dinilai tersebut meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Hasil evaluasi secara kumulatif atas komponen perencanaan kinerja sebesar 89,50% dengan kategori A; Pengukuran kinerja sebesar 68,75% dengan kategori B; dan Evaluasi Internal sebesar 72,68% dengan kategori BB
2. Program Pengelolaan Sampah yang merupakan program prioritas di Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran mengurangi sampah dan persentase sebagai indikatornya. Adapun target dari sampah yang ditangani yaitu **28%** dan pada tahun 2024 target yang dicapai pada selama satu tahun yaitu hanya 1,51 % . Realisasi ini sangat jauh dari target yang ingin dicapai, hal ini karena masih terdapatnya berbagai kekurangan baik dari segi sarana dan prasarana serta masih terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pengelolaan sampah. Penanganan sampah di Kabupaten Seluma masih dilakukan pada lingkup Kota Tais yaitu masih pada 1 Kecamatan, hal ini karena armada pengangkutan masih terbatas, tenaga kebersihan yang kurang serta masih belum optimalnya pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Tahun 2024 yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menetapkan Jumlah

usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi sebagai indikatornya. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebanyak **12 Usaha dan/atau kegiatan** yang dibina dan diawasi, realisasi yang diperoleh sebanyak **12 Usaha dan/atau kegiatan** atau sebesar **100%**. Sedangkan untuk kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan atau izin PPLH pada tahun 2024 indikator keluarannya yaitu jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis , persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan dengan target **15 Dokumen** yang terealisasi sebanyak **3 Dokumen** atau dengan persentase **20%**. Hal ini karena dari 5 Usaha dan/atau kegiatan yang telah mengajukan rekomendasi izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH , baru 3 yang memenuhi syarat selama tahun 2024.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) pada Tahun 2024 yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan memiliki indikator penetapan persentase RTH yang dikelola dengan baik yang ditargetkan dengan persentase **86%** dan terealisasi sebesar **86%** atau dapat mencapai target.
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) menetapkan indikator Jumlah Pelaku Usaha /Kegiatan yang mengelola limbah B3. Pada penetapan indikator ini, tahun 2024 memiliki target sebanyak **16 Kegiatan/Usaha** yang diawasi pengelolaan limbah B3 dan dari target tersebut realisasinya dapat tercapai 100%.

Pelaksanaan dan pencapaian renja sampai dengan tahun 2023 dapat disajikan pada tabel T-C.29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023.

Tabel T-C 29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Seluma**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (tahun n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (tahun n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2024
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	05				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup									
2	05	01			Dinas Lingkungan Hidup									
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	4.073.785.295							

2	5	1	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian laporan perencanaan tepat waktu	25.864.020							
2	5	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5.813.300	14.978.000	20.000.000	19.928.000	99,64%	19.999.880	8.750.000	43,75%
2	5	1	01	02	Koordinasi dan Penusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	4.500.200	4.500.000	-	-	-	-	-	
2	5	1	01	03	Koordinasi dan Penusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKPA	5.000.000	4.900.000	-	-	-	-	-	
2	5	1	01	04	Koordinasi dan Penusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	4.501.200	3.500.000	-	-	-	-	-	-
2	5	1	01	05	Koordinasi dan Penusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA	3.549.320		-	-	-	-	-	-
2	5	1	01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP	2.500.000	1.950.000	-	-	-	-	-	-
2	5	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan OPD	2.530.054.000							
2	5	1	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	2.324.088.000	2.307.417.6 52	2.497.475.47 5	2.372.223.063	94,98%	2.841.091.113	1.745.582.329	61,44%
2	5	1	01	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Petugas Adm Keuangan	156.000.000	156.000.000	113.171.000	113.171.000	100%	121.000.000	69.108.000	57,11%
2	5	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Petugas Adm Keuangan	47.424.000	47.424.000	58.080.000	58.080.000	100%	58.080.000	25.620.000	44,11%

2	5	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun	2.542.000	2.479.000	2.541.980	2.400.000	94,41%	2.541.980	2.541.980	100%
2	5	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase pemenuhan adm pengurus / penyimpan barang	12.000.000							100%
2	5	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Petugas Pengurus/Penyimpan Barang	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100%	12.000.000	12.000.000	100%
2	5	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	219.004.100							100%
2	5	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Penerangan bangunan kantor	15.000.000	12.000.000	9.999.260	6.250.000	62,5%	19.999.260	19.999.260	100%
2	5	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang disediakan	15.000.000	12.690.000	20.000.000	19.997.000	99,99%	20.000.000	20.000.000	100%
2	5	1	06	02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat Tulis Kantor yang tersedia	50.000.000	37.487.000	-	-	-	-	-	-
2	5	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat Tulis Kantor yang tersedia			63.350.000	63.291.000	99,91%	73.000.000	73.000.000	100%
2	5	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	15.008.600		15.010.600	14.855.000	98,96%	20.010.600	20.010.600	100%
2	5	1	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah	16.995.500		16.995.500	15.140.000	89,08%	16.995.500	16.995.500	100%

						serta Ucapan dan iklan								
2	5	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kebutuhan Makan & Minum	32.000.000		45.000.000	44.962.000	99,92%	45.000.000	45.000.000	100%
2	5	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Perjalanan dinas	75.000.000		106.205.000	100.434.748	94,57%%	106.205.000	106.205.000	94%
2	5	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	5	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipenuhi			-	-	-	-	-	-
2	5	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah	1.053.798.875							
2	5	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar dan materai/benda pos lainnya	10.800.000		7.300.000	7.294.000	99,92%	10.400.000	10.400.000	100%
2	5	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Air, Listrik dan Internet	14.998.875		20.477.875	14.959.287	73,05%	14.998.875	14.998.875	100%
2	5	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Cleaning Service/Petugas Kebersihan	1.028.000.000		1.183.294.400	1.180.244.400	99,74%	750.000.000	750.000.000	100%
2	5	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah	133.064.300							100%

2	5	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	107.572.000		89.572.000	86.022.000	96,04%	104.572.000	104.572.000	100%
2	5	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin , Jumlah Pemeliharaan LPJU	5.492.300		65.000.000	65.000.000	100%	20.000.000	20.000.000	100%
2	5	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor			87.197.900	86.615.800	99,33%	145.492.300	145.492.300	100%
2	5	1	21		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan yang disusun	300.000.000		249.999.850	193.771.938	77,51%	299.999.940	299.999.940	100%
2	5	1	21		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Persentase penyelesaian Dokumen KLHS Kabupaten /Kota	300.000.000		249.999.850	193.771.938	77,51%	299.999.940	299.999.940	100%
2	5	1	21	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Penyelesaian Pembuatan Dokumen KLHS	300.000.000		249.999.850	193.771.938	77,51%	299.999.940	299.999.940	100%
2	5	1	17		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani	20.000.000		20.000.000	9.194.700	45,97%	25.000.000	25.000.000	100%
2	5	1	17		Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan	Jumlah Penanganan pengaduan	20.000.000		20.000.000	9.194.700	45,97%	25.000.000	25.000.000	100%

					Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	masyarakat terkait izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kab/Kota								
2	5	1	17	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	20.000.000		20.000.000	9.194.700	45,97%	25.000.000	25.000.000	100%
2	5	1	17	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen informasi pelaksanaan dan pengendalian Emisi GRK			10.000.000	9.460.000	95%			
2	5	1	21		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	49.101.200		119.101.200	103.016.000	87,00%	79.101.200	79.101.200	100%
2	5	1	21		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten /Kota	49.101.200		119.101.200	103.016.000	87,00%	79.101.200	79.101.200	100%

2	5	1	21	02	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas kawasan RTH (ha) yang dikelola Panjang Median Jalan yang di kelola	49.101.200		119.101.200	103.016.000	87,00%	79.101.200	79.101.200	100%
2	5	1	21		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Pelaku Usaha /Kegiatan yang mengelola limbah B3	15.000.000		15.000.000	10.780.000	71,87%	20.000.000	20.000.000	100%
2	5	1	21		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Peningkatan Penyimpanan Sementara LB3	15.000.000		15.000.000	10.780.000	71,87%	20.000.000	20.000.000	100%
2	5	1	21	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Pengawasan dan Verifikasi terhadap LB3	15.000.000		15.000.000	10.780.000	71,87%	20.000.000	20.000.000	100%
2	5	1	23		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Izin Lingkungan dan PPLH yang dibina dan diawasi	10.000.000							100%
2	5	1	23		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelayakan			17.000.000	11.450.000	67,35%			100%

					Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	operasi Izin Lingkungan								
2	5	1	23	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Verifikasi Terhadap izin lingkungan yang digunakan (sebelum terbit)	10.000.000		12.000.000	7.050.000	58,75%	15.000.000	15.000.000	100%
2	5	1	23	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan dan/usaha	5.000.000		5.000.000	4.400.000	88,00%	5.000.000	5.000.000	100%
2	5	1	29		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Volume Sampah yang terkelola	50.000.000		131.000.000	98.432.750	87,11%	76.000.000	76.000.000	100%
2	5	1	29		Pengelolaan Sampah	JUmlah Sampah yang terangkut (ton)	50.000.000		131.000.000	98.432.750	87,11%	76.000.000	76.000.000	100%
2	5	1	29	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan Pengelahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	JUmlah Sampah yang terangkut (ton)	50.000.000		131.000.000	98.432.750	87,11%	76.000.000	76.000.000	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Standart Pelayanan Minimum (SPM) bidang lingkungan hidup ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup no 19 tahun 2008 tentang standart pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelayanan tersebut mencakup :

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma dilakukan melalui program Pengelolaan Sampah yang salah satu keluarannya merupakan penanganan sampah pada Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk volume sampah yang terangkut sampai pada tahun 2023 belum sesuai target pada indikator kinerja yaitu 27 %.

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup tidak terlepas dari peran serta dari Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Dalam hal ini program yang dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma adalah Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI). Luasan lahan ruang terbuka hijau adalah 8,2 Ha.

Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma mencakup indikator SPM dan indikator Kinerja Kunci (IKK), secara lengkap diuraikan pada tabel T-C.30

Tabel T-C. 30

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Seluma**

No	Indikator *)	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup												
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	SPM		55,21	55,26	55,32	55,38	60,00	00,00	46	50	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	SPM		91,36	91,45	91,54	91,64	94,48	93,88	91,35	91,25	
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	SPM		-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Indeks Tutupan Lahan (ITH)	SPM		55	55,25	55,35	54,87	45,94	45,33	46,25	48,15	

Pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup untuk tahun 2024 sampai dengan tahun berjalan 2025 tidak dapat dilakukan. Hal ini karena SPM bidang lingkungan hidup bukan merupakan urusan wajib.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Seluma sebagaimana tertuang dalam RPJMD secara umum pada Dinas Lingkungan Hidup meliputi :

I. Bidang Lingkungan Hidup

1. Terkait dengan perizinan tentang status jalan dan tempat jalan yang akan dibangun yang apabila berada di kawasan lindung atau berbatasan dengan kawasan lindung, maka wajib memiliki AMDAL dan apabila berada diluar kawasan lindung maka diwajibkan dengan melengkapi dokumen UKL-UPL atau SPPL.
2. Terkait dengan untuk memajukan desa atau pengembangan desa dalam menghadapi adaptasi dan mitigasi lingkungan (program kampung iklim), maka perlu adanya pelatihan /arahan kepada masyarakat
3. Perlu sosialisasi dan pembaharuan serta pembuatan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang disesuaikan dengan aturan yang baru, serta pelatihan ASN terhadap peraturan terbaru
4. Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan pelatihan untuk pemahaman peraturan-peraturan terbaru
5. Pemenuhan sarana dan prasarana lapangan terutama alat transportasi

II. Bidang Pertamanan

1. Dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Seluma yang belum dapat difungsikan dengan kegunaannya, hal ini dikarenakan masih kurang sarana dan prasarana yang mendukung serta terbatasnya anggaran yang tersedia.
2. Terkait dengan adanya SK penetapan dan Master plan pembangunan hutan kota Kabupaten seluma yang belum terealisasi
3. Belum adanya anggaran, sarana dan prasarana, izin lingkungan serta master plan dalam pembangunan Taman Ramah Anak di Kaabupaten Seluma
4. Terkendalanya dalam pemeliharaan lampu jalan di Kabupaten seluma sehingga banyak lampu jalan yang sudah rusak dan tidak layak pakai. Hal ini juga di

dukung masih kurangnya sumber daya manusia teknis dan fasilitas kendaraan untuk operasional

5. Terkendalanya anggaran untuk renovasi median jalan dan kastin yang rusak pada jalur- jalur jalan di kota Kabupaten Seluma.

III. Bidang Kebersihan

1. Kurang maksimalnya sarana dan prasarana, anggaran yang tersedia serta kendaraan atau armada operasional dalam proses pengeloaan dan pengangkutan persampahan di Kabupaten Seluma, sehingga target yang telah ditetapkan belum dapat terpenuhi
2. Masih belum berfungsinya Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) di Kabupaten Seluma karena belum adanya akses jalan yang bagus, belum adanya jaringan listrik serta belum terbentuknya UPTD TPA
3. Belum adanya SK Bupati Kabupaten Seluma terkait penunjukan lokasi IPLT
4. Belum terlaksana pembangunan Bank Sampah
5. Belum terlaksananya pelatihan dan sosialisasi terhadap tenaga kebersihan
6. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang ada di Kabupaten Seluma belum memenuhi Standart Operasional Prosedur (SOP)
7. Perlunya anggaran dan komitmen unsur terkait untuk pembangunan gudang peralatan pool kendaraan operasional persampahan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 (satu) tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA SKPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rancangan awal RKPD Kabupaten Seluma tahun 2025 telah disusun pada tahun 2024. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam Rancangan Awal RKPD terdapat beberapa program yang dicantumkan dalam RENJA Dinas Lingkungan Hidup, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Pengelolaan Persampahan

Review terhadap RKPD tahun 2025 secara rinci disajikan dalam tabel T-C. 31. Pada tabel tersebut disampaikan perbandingan antara program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

Tabel T-C. 31
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
Kabupaten Seluma

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup.

Lembar dari

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH Kab. Seluma	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	4.031.948	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH Kab. Seluma	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	4.031.948	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DLH Kab. Seluma				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH Kab. Seluma	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 OB	5.192.209.914	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH Kab. Seluma	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 OB	5.192.209.914	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DLH Kab. Seluma	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	11.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DLH Kab. Seluma	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	11.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DLH Kab. Seluma	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	69.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DLH Kab. Seluma	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	69.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.270.865	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.270.865	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.200.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.200.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					

	Belanja Kursus/Pelatihan , Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	DLH Kab. Seluma	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pelatihan/bimtek	2 Orang	22.000.000	Belanja Kursus/Pelatihan , Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	DLH Kab. Seluma	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pelatihan/bimtek	2 Orang	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	18.955.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	18.955.900	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	7.999.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	7.999.800	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	12.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	12.500.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DLH Kab. Seluma	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	10 Dok	5.625.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DLH Kab. Seluma	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	10 Dok	5.625.000	

			Undangan yang Disediakan					Undangan yang Disediakan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.360.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.360.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	19.205.280	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	19.205.280	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jumlah Laporan Jasa yang dibayarkan			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.758.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.758.800	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	635.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	635.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	DLH Kab. Seluma				

						Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DLH Kab. Seluma	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	39.929.325	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DLH Kab. Seluma	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	39.929.325	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLH Kab. Seluma	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	3.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLH Kab. Seluma	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	3.000.000	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang disusun	100%	179.046.540	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang disusun	100%	179.046.540	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota		Persentase penyelesaian dokumen KLHS Kabupaten/Kota	100%	179.046.540	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota		Persentase penyelesaian dokumen KLHS Kabupaten/Kota	100%	179.046.540	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	DLH Kab. Seluma	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	179.046.540	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	DLH Kab. Seluma	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	179.046.540	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase dokumen uji kualitas lingkungan hidup terpenuhi	100%	22.296.000	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase dokumen uji kualitas lingkungan hidup terpenuhi	100%	22.296.000	
	Pencegahan Pencemaran		Jumlah Persentase	100%	22.296.000	Pencegahan Pencemaran		Jumlah Persentase dokumen uji	100%	22.296.000	

	dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		dokumen uji kualitas lingkungan hidup terpenuhi			dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		kualitas lingkungan hidup terpenuhi			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	DLH Kab. Seluma	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dok	11.056.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	DLH Kab. Seluma	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dok	11.056.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	DLH Kab. Seluma	Jumlah Dokumen informasi pelaksanaan dan pengendalian Emisi GRK	3 Dok	11.240.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	DLH Kab. Seluma	Jumlah Dokumen informasi pelaksanaan dan pengendalian Emisi GRK	3 Dok	11.240.000	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		Persentase Pengelolaan KEHATI yang terlaksana	86 %	22.357.640	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		Persentase Pengelolaan KEHATI yang terlaksana	86 %	22.357.640	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	86 %	22.357.640	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	86 %	22.357.640	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DLH Kab. Seluma	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8,2 Ha	22.357.640	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DLH Kab. Seluma	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8,2 Ha	22.357.640	
	Program Pengendalian Bahan		Persentase Jumlah Laporan	100%	2.560.000	Program Pengendalian		Persentase Jumlah Laporan	100%	2.560.000	

	Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Pengendalian izin penyimpanan sementara LB3			Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Pengendalian izin penyimpanan sementara LB3			
	Penyimpanan Sementara Limbah B3		Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang mengelola limbah B3	12 Usaha dan/atau Kegiatan	2.560.000	Penyimpanan Sementara Limbah B3		Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang mengelola limbah B3	12 Usaha dan/atau Kegiatan	2.560.000	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 Lap	2.560.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 Lap	2.560.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelayakan operasi Izin Lingkungan	90 %	11.872.245	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelayakan operasi Izin Lingkungan	90 %	11.872.245	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh		Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelayakan operasi Izin Lingkungan	100%	11.872.245	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh		Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelayakan operasi Izin Lingkungan	100%	11.872.245	

	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	DLH Kab. Seluma	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	3 Dokumen	4.870.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	DLH Kab. Seluma	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	3 Dokumen	4.870.000	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DLH Kab. Seluma	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	12 Badan Usaha	7.002.245	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DLH Kab. Seluma	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	12 Badan Usaha	7.002.245	
	Program Pengelolaan Persampahan		Persentase Pengelolaan Sampah yang baik	30%	5.508.926	Program Pengelolaan Persampahan		Persentase Pengelolaan Sampah yang baik	30%	5.508.926	
	Pengelolaan Sampah		Jumlah sampah yang dipilah	2000 ton	5.508.926	Pengelolaan Sampah		Jumlah sampah yang dipilah	2000 ton	5.508.926	
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan Pengelahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	DLH Kab. Seluma	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	48.422 ton/tahun	5.508.926	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan Pengelahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	DLH Kab. Seluma	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	48.422 ton/tahun	5.508.926	
	UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
Administrasi Umum Perangkat Daerah						Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.500.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.500.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.179.900		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.179.900	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	999.945		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Peralatan. Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	999.945	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	999.980		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	999.980	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	3.556.380		Fasilitasi Kunjungan Tamu	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	3.556.380	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	960.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	960.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DLH Kab. Seluma	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	55.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DLH Kab. Seluma	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	55.000.000	
	UPTD LABORATORIUM										

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
Administrasi Umum Perangkat Daerah						Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	841.195		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	841.195	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.000.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.750.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DLH Kab. Seluma	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.750.000	
Fasilitas Kunjungan Tamu	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 Laporan	2.500.000		Fasilitas Kunjungan Tamu	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 Laporan	2.500.000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1.680.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1.680.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	DLH Kab. Seluma	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.800.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase peningkatan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah	100%	4.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase peningkatan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah	100%	4.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DLH Kab. Seluma	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	4.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DLH Kab. Seluma	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	4.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan undang-undang no 25 tahun 2004 tentang sistem Pembangunan Nasional bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk priode 1 (satu) tahun. Untuk menyusun RKPD , pemerintah wajib melaksanakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Selanjutnya sesuai dengan undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satunya mengamanatkan pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Seluma untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan SKPD.

Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Musrenbang mulai dilakukan dari jenjang desa/kelurahan, kecamatan sampai dengan kabupaten. Rincian usulan masyarakat dantindaklanjut hasil verifikasi dapat dilihat pada tabel T-C 32 dokumen RENJA ini.

Tabel T-C.32
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Kabupaten Seluma
Tahun 2025

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan ***)
1	2	3	4	5	6
1	Program Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu- 3R	Kel. Lubuk Kebur; Kel. Talang Saling; kel Dusun Baru; Kel. Lubuk Lintang; Kel. Padang Merbau; Kel. Rimbo Kedua; Desa Purbosari	Persentase Pembangunan Pengelolaan Sampah 3R	Masing-masing 15 x 20 M	
2	Program Pembangunan SANIMAS	Kel. Talang Dantuk; Kel. Talang Saling; Kel. Napal; Kel. Sidomulyo; Desa Sukarami; Desa. Tanjung Seru	Persentase Pembangunan SANIMAS	Masing-masing 15 x 15 M	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional perencanaan pembangunan lingkungan hidup Indonesia berpusat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan perubahannya, yang mengatur kerangka terencana dan terintegrasi untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan keberlanjutan ekosistem. Kebijakan ini diwujudkan melalui instrumen seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), yang digunakan untuk menyusun strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mengantisipasi dampak lingkungan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.

Penyusunan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi. Adapun hasil identifikasi Kebijakan Nasional bidang lingkungan Hidup :

1. Penyusunan Dokumen **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)**: Dokumen ini merumuskan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta mengatur langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang perlu dilakukan untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.
2. Penyusunan Dokumen **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**: Digunakan untuk mengantisipasi dampak lingkungan dalam perencanaan pembangunan, memastikan kawasan yang dibangun tidak hanya memperhatikan keuntungan ekonomi tetapi juga keberlanjutan ekosistem dan keselamatan masyarakat.
3. Penyusunan **Rencana Aksi Daerah Tindak Pencegahan Bencana (RADTPB)**: Merupakan instrumen yang memastikan kawasan dibangun dengan memperhatikan potensi bencana yang dapat terjadi, sehingga pembangunan lebih bijaksana dan mengurangi risiko bencana.

Adapun focus dan tujuan kebijakan mengacu pada :

1. **Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim**: RPPLH menjadi landasan untuk merumuskan strategi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan memitigasi dampaknya, misalnya melalui rehabilitasi mangrove atau kebijakan transportasi ramah lingkungan.

2. **Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Program bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam seperti hutan, laut, air, dan udara, serta mencegah kerusakan lingkungan.
3. **Partisipasi Masyarakat:** Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan lokal dan aspirasi masyarakat.
4. **Penyediaan Informasi:** Melakukan inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi lengkap mengenai potensi dan produktivitas lingkungan hidup.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan visi dan misi, merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu yaitu 1(satu) tahun smpai dengan 5(lima) tahun kedepan. Dalam rangka mencapai visi yang telah dikemukakan diatas dan memperhatikan nilai-nilai dan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang target pencapaiannya diukur setiap tahunnya baik kualitas maupun kuantitas. Sasaran yang ingin ditunjukkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya Sampah
2. Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan
3. Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau
4. Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD
5. Meningkatkan Nilai Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik

3.3 Program dan Kegiatan

A. PROGRAM

Program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Pengelolaan Persampahan
7. UPTD Pengelolaan Persampahan
8. UPT Laboratorium

B. KEGIATAN

Rencana Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
8. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
9. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
10. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Ditertibkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
11. Kegiatan Pengelolaan Sampah

Tabel T-C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Seluma

KODE					Urusan /BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator
1					2	3	4	5	6	7	8	11	12
2	05				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
2	05	01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH	10 Dokumen	4.031.948			10 Dokumen	25.864.020
2	5	1	01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2	5	1	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DLH	22 OB	5.192.209.914			22 OB	5.285.510.836

2	5	1	01	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DLH	12 Dokumen	11.000.000			12 Dokumen	12.000.000
2	5	1	01	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DLH	12 Dokumen	69.500.000			12 Dokumen	69.500.000
2	5	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DLH	1 Laporan	1.270.865			1 Laporan	2.541.730
2	11	01	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2	11	01	2.0 3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DLH	12Laporan	7.200.000			12Laporan	7.200.000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kedisiplinan ASN di OPD							
					Belanja Kursus/Pelatihan , Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan/bimtek	DLH	2 Orang	-			5 org	50.000.000

2	5	1	01	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2	11	01	2	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DLH	50 Paket	6.000.000			12 Paket	19.999.260
2	11	01	2	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DLH	50 Paket	18.955.900			12 Paket	50.000.000
2	11	01	2	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DLH	30 Paket	7.999.800			12 Paket	20.000.000
2	11	01	2	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DLH	50 Paket	12.500.000			50 Paket	20.900.000
2	11	01	2	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DLH	10 Dokumen	5.625.000			10 Dokumen	16.995.500
2	11	01	2	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DLH	12 Laporan	9.360.000			12 Laporan	45.000.000

2	11	01	2	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH	10 Laporan	19.205.280			35 Laporan	70.000.000
2	5	1	06	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	5	1	06	03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLH	12 Laporan	9.000.000			12 Laporan	10.400.000
2	5	1	06	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DLH	12 Laporan	17.758.800			12 Laporan	18.998.875
2	5	1	06	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DLH	12 Laporan	635.000.000			12 Laporan	1.230.000.000
2	5	1	06	06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	5	1	06	08	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	DLH	4 Unit	39.929.325			7 Unit	105.000.000

						Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
2	5	1	06	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DLH	7 Unit	3.000.000			10 Unit	20.000.000
2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang disusun	DLH	100%	179.046.540			100%	300.000.000
2	11	02	2	02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Persentase penyelesaian dokumen KLHS Kabupaten/Kota	DLH	100%	179.046.540			100%	300.000.000
02	2	02	00	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah penyelesaian pembuatan dokumen KLHS	DLH	1 Dok	179.046.540			1 Dok	300.000.000
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen uji kualitas lingkungan hidup terpenuhi	DLH	100%	22.296.000			100%	25.000.000
2	11	03	2	01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase dokumen uji kualitas lingkungan hidup terpenuhi	DLH	100%	22.296.000			100%	25.000.000
03	2	2	00	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen informasi pelaksanaan dan pengendalian Emisi GRK	DLH	3 Dokumen	11.240.000			1 Dokumen	25.000.000

03	2	2	00	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	DLH	1 Dokumen	11.056.000			1 Dokumen	25.000.000
2	11	04			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Pengelolaan KEHATI yang terlaksana	DLH	86%,	22.357.640			100%	94.101.200
2	11	04	2	01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten /Kota	Persentase Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	DLH	86%,	22.357.640			100%	94.101.200
04	2	01	00	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	DLH	8,2 Ha	22.357.640			8,2 Ha	94.101.200
2	11	05			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Jumlah Laporan Pengendalian izin penyimpanan sementara LB3	DLH	100%	2.560.000			100%	20.000.000
2	11	05	2	01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Laporan verifikasi Penyimpanan sementara LB3	DLH	100%	2.560.000			100%	20.000.000
05	2	01	00	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi	DLH	10Laporan	2.560.000			10Laporan	20.000.000

					Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3							
2	11	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelayakan operasi Izin Lingkungan	DLH	100 %	11.872.245			100 Persentase	45.000.000
2	11	06	2	01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelayakan operasi Izin Lingkungan	DLH	100 %	11.872.245			100 Persentase	45.000.000
06	2	01	00	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	DLH	3Dokumen	4.870.000			10 Dokumen	25.000.000
06	2	01	00	09	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usahadan/atau kegiatan yang diawasi	DLH	12 Badan Usaha	7.002.245			12 Badan Usaha	20.000.000

2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah yang baik	DLH	30 %	5.508.926			35 %	100.000.000
2	11	11	2	01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dipilah	DLH	2000 ton	5.508.926			5000 ton	100.000.000
11	2	01	00	20	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah umlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	DLH	2000 ton	5.508.926			5000 ton	100.000.000
2	11	00	13	01	UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
2	11	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
2	11	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
01	2	06	00	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DLH	100 Paket	2.500.000			100 Paket	5.000.000
01	2	06	00	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	DLH	5 Paket	1.179.900			5 Paket	2.359.800

						Kantor yang Disediakan							
01	2	06	00	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DLH	3 Paket	999.545			12 Paket	11.000.000
01	2	06	00	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DLH	5 Paket	999.980			12 Paket	6.000.000
01	2	06	00	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DLH	5 Laporan	3.556.380			10 Laporan	5.000.000
01	2	06	00	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH	3 Laporan	960.000			5 Laporan	5.000.000
2	11	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
01	2	08	00	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLH	1 Laporan	500.000			12 Laporan	5.000.000
01	2	08	00	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DLH	3 Laporan	13.200.000			12 Laporan	20.000.000

2	11	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
01	2	09	00	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DLH	5 Unit	55.000.000			14 Unit	190.000.000
2	11	00	13	02	UPTD LABORATORIUM								
2	11	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
2	11	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
01	2	06	00	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DLH	2 Paket	841.195			2 Paket	1.500.000
01	2	06	00	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DLH	6 Paket	1.000.000			5 Paket	5.000.000

01	2	06	00	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DLH	1 Paket	1.000.000			5 Paket	5.000.000
01	2	06	00	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DLH	1 Paket	5.750.000			5 Paket	5.000.000
01	2	06	00	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DLH	100 Laporan	2.500.000			100 Laporan	5.000.000
01	2	06	00	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH	5 Laporan	1.680.000			5 Laporan	3.500.000
2	11	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
01	2	08	00	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DLH	2 Laporan	29.800.000			12 Laporan	29.800.000
2	11	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

01	2	09	00	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DLH	1Unit	4.000.000			1 Unit	10.000.000
----	---	----	----	----	--	---	-----	-------	-----------	--	--	--------	------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Seluma serta program yang dirumuskan pada Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target perangkat daerah penanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan pada setiap tahunnya. Rumusan target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan masing-masing dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber-sumber lainnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seluma Tahun 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2025.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2025 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian- penyesuaian seperlunya. Rencana Kerja tahun 2025 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma.